



Abstract

Over the past few decades, many countries have increased private parties in public services, with 53.2% of power plant projects in sub-Saharan African countries being private companies, indicating government failure in providing electricity services. This led to the development of Public-Private Partnerships (PPPs), where regional, local, and national governments have a contractual arrangement of full privatization and direct government provision.

This study found that (1) China is the most discussed country in energy project PPPs, with Build-Operate-Transfer (BOT) being the most common model. (2) BOT involves regulated private sector companies financing, designing, constructing, and operating facilities for concession periods before being sent to the government. (3) Challenges include social issues, government dependence, and economic issues. (4) The most significant barriers are social issues, government instability, economic issues, and management barriers. These include lack of community engagement, political instability, and limited financing options. The study highlights the need for clear guidelines, technical capacity, and coordination in energy project PPPs.

Keyword: Systematic Literature review, Public Private Partnership, Challenge, Energy Project

Abstrak

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara telah meningkatkan jumlah pihak swasta dalam pelayanan publik, dengan 53,2% proyek pembangkit listrik di negara-negara Afrika sub-Sahara adalah perusahaan swasta, yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan listrik. Hal ini mengarah pada berkembangnya Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), dimana pemerintah daerah, lokal, dan nasional mempunyai perjanjian kontrak privatisasi penuh dan penyediaan langsung pemerintah.

Studi ini menemukan bahwa (1) Tiongkok adalah negara yang paling banyak dibahas dalam KPS proyek energi, dengan Build-Operate-Transfer (BOT) menjadi model yang paling umum. (2) BOT melibatkan perusahaan swasta yang diatur dalam pembiayaan, perancangan, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas selama masa konsesi sebelum diserahkan kepada pemerintah. (3) Tantangannya meliputi permasalahan sosial, ketergantungan pada pemerintah, dan permasalahan ekonomi. (4) Hambatan yang paling besar adalah permasalahan sosial, ketidakstabilan pemerintahan, permasalahan ekonomi, dan hambatan pengelolaan. Hal ini mencakup kurangnya keterlibatan masyarakat, ketidakstabilan politik, dan terbatasnya pilihan pendanaan. Studi ini menyoroti perlunya pedoman yang jelas, kapasitas teknis, dan koordinasi dalam KPS proyek energi.

Kata Kunci: Tinjauan Pustaka Sistematis, Kemitraan Pemerintah Swasta, Tantangan, Proyek Energi